II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Deskripsi Teoritis

1. Pengertian Peranan

Kata lain dari peran sering diucapkan banyak orang, sering terdengar kata-kata peran yang dikaitkan dengan posisi seseorang dan kedudukan seseorang. Atau kata lain dari peran dapat dikaitkan dengan apa yang dilakoninya dan apa yang dimainkan, oleh seseorang aktor dalam suatu drama. Tidak banyak orang yang tahu tentang kata peran, atau dalam bahasa Inggrisnya *role* yang memang diambil dari kata *dramaturgy* atau seni tari. Yang lebih jelasnya kata peran atau *role* dalam kamus *oxford dictionary* diartikan sebagai *Actor's part; one's task or function*. Yang artinya aktor; tugas seseorang atau fungsi.

Dilihat dari segi secara umum peranan adalah tindakan yang dilakukan seseorang terkait dengan kedudukannya yang terlingkup dalam struktur sosial dan kelompok sosial yang ada pada masyarakat. Yang artinya setiap orang mempunyai peranan masing-masing sesuai dengan kedudukan yang telah dimiliki.

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia "peran yang berarti perangkat tingkah atau karakter yang dharapkan atau dimiliki oleh orang yang

berkedudukan dalam masyarakat, sedangkan peranan adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa".

Selain itu menurut Departemen Pendidikan Nasional "peranan adalah perangkat tingkah laku yang diharapkan atau dimiliki oleh seseorang yang berkecimpung di dalam suatu masyarakat, peran terutama ditentukan oleh ciri-ciri individual yang bersifat khas atau istimewa".

Menurut Soerjono Soekanto (2006: 212) bahwa:

> Peranan adalah aspek dinamis dari kedudukan (status). Apabila seseorang melakukan atau melaksanakan hak-hak dan kewajibannya sesuaian dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peranan. Dalam hal ini peranan mencakup tiga hal yaitu:
> a) Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan sengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
> b) Peranan adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
> c) Peranan dapat diartikan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa peranan merupakan tindakan atau perilaku yang dilaksanakan oleh seseorang yang dilakukan seseorang dalam menempati atau memangku suatu posisi dan melaksanakan hak-hak dan kewaijibannya sesuai dengan kedudukannya.

2. Tinjauan Tentang PKK

a. Pengertian PKK

Berdasarkan Permendagri Nomor 1 Tahun 2013 Pasal 1 bahwa:

> Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, selanjutnya disingkat Gerakan PKK adalah gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolaannya dari, oleh dan untuk masyarakat, menuju

> terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan.

Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) merupakan wadah membina keluarga bermasyarakat baik di perkotaan maupun di pedesaan yang dapat menghasilkan sinergi untuk keluarga sejahtera yang mandiri dengan meningkatkan mental spiritual perilaku hidup dengan menghayati dan mengamalkan Pancasila. Dapat dikembangkan lebih luas lagi dengan berbagai upaya atau usaha dan kegiatan, seperti meningkatkan pendidikan dan ketrampilan yang diperlukan, ikut mengupayakan dalam kehidupan bangsa serta meningkatkan pendapatan keluarga, meningkatkan kualitas adan kuantitas pangan keluarga, meningkatkan derajat kesehatan, kelestarian lingkungan hidup serta membiasakan hidup berencana dalam semua aspek kehidupan dan perencanaan ekonomi keluarga dengan membiasakan menabung. Dalam melakukan kegiatan tersebut perlu adanya pengelolaan PKK baik kegiatan pengorganisasian maupun pelaksaan program-program, yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat (Sutedjo, 2006: 3). Dengan adanya kegiatan PKK diharapkan dapat meningkatkan kesetaraan keluarga pada umumnya yang berpedoman pada pelaksaan kegiatan 10 Program Pokok PKK. Selain memiliki program-program pokok, PKK juga memiliki panca dharma PKK. Isi dari panca dharma ini tentang peranan-peranan wanita dalam kehidupan, yaitu sebagai berikut:

1) Wanita sebagai pendamping suami

2) Wanita sebagai pengelola rumah tangga

3) Wanita sebagai penerus keturunan dan pendidik anak

4) Wanita sebagai pencari nafkah tambahan

5) Wanita sebagai warga negara dan anggota masyarakat

b. Visi dan Misi PKK

1) Visi

Terwujudnya keluarga yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju, mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan.

2) Misi

a) Meningkatkan mental spiritual, perilaku hidup dengan menghayati dan mengamalkan Pancasila serta meningkatkan pelaksanaan hak dan kewajiban sesuai dengan Hak Asasi Manusia (HAM), demokrasi, meningkatkan kesetiakawanan sosial dan kegotongroyongan serta pembentukan watak bangsa yang selaras, serasi dan seimbang.

b) Meningkatkan pendidikan dan ketrampilan yang diperlukan, ikut mengupayakan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa serta meningkatakan pendapatan keluarga.

c) Meningkatkan kualitas dan kuantitas pangan keluarga, serta upaya peningkatan pemanfaatan pekarangan melalui Halaman Asri, Teratur, Indah dan Nyaman (hatinya) PKK, sandang dan perumahan serta tata laksana rumah tangga yang sehat.

d) Meningkatkan derajat kesehatan kelestarian lingkungan hidup serta membiasakan hidup berencana dalam semua aspek kehidupan dan perencanaan ekonomi keluarga dengan membiasakan menabung.

e) Meningkatkan pengelolaan Gerakan PKK, baik kegiatan pengorganisasian maupun pelaksanaan program-programnya, yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat setempat.

c. Tujuan PKK

1) Tujuan Umum

Dalam kurun waktu ke waktu akan mendorong peningkatan kemandirian Gerakan PKK dalam keluarga dan masyarakat di lingkungannya melalui pelaksanaan kegiatan 10 Program Pokok PKK.

2) Tujuan Khusus

Dalam kurun waktu yang relatif pendek akan meningkatkan efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan kegiatan 10 Program Pokok PKK yang merata di semua jenjang, serta meningkatkan mutu pengorganisasian Gerakan PKK dan kapasitas Gerakan PKK baik di desa dan maupun di kota dengan kader-kader yang handal dan berkualitas, serta meningkatkan kemitraan dalam pelaksanaan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

d. Prinsip Dasar PKK

Dalam menyusun suatu rencana kerja atau kegiatan perlu memperhatikan beberapa prinsip dasar antara lain:

1) Adanya sejumlah kekuatan yang dimiliki atau kekuatan yang mendukung, baik internal maupun eksternal yang berpengaruh terhadap upaya atau kegiatan yang akan dilakukan.

2) Adanya berbagai kelemahan yang dihadapi dan yang secara nyata berpengaruh terhadap proses kegiatan yang akan dilakukan.

3) Adanya beberapa peluang atau kondisi yang memungkinkan sehingga dapat didayagunakan atau dimanfaatkan untuk memperlancar tujuan yang akan dicapai.

4) Adanya ancaman yang diperkirakan dapat berpengaruh secara langsung terhadap pencapaian tujuan kegiatan yang dilakukan.

PKK dapat menyusun suatu rencana kerja secara baik, tepat guna, tepat sarana dan sesuai dengan permasalahan yang dihadapi maupun potensi yang dimiliki khususnya di Kampung Endang Rejo.

e. Program Kelompok Kerja PKK

1) Pokja I mengelola program:
   a) Penghayatan dan Pengamalan Pancasila
   b) Gotong royong
2) Pokja II mengelola program:
   a) Pendidikan dan Ketrampilan
   b) Pengembangan Kehidupan Berkoperasi
3) Pokja III mengelola program:
   a) Pangan
   b) Sandang

c) Perumahan dan Tata Laksana Rumah Tangga

4) Pokja IV mengelola program:

a) Kesehatan

b) Kelestarian Lingkungan Hidup

c) Perencanaan Sehat

f. Program Pokok PKK

Program PKK pada disesuaikan dengan Pedoman Umum baru Tim Penggerak PKK di dalam melaksanakan 10 Program Pokok PKK, telah melakukan pembenahan-pembenahan kesekretariatan dan pembinaan langsung ke setiap Kecamatan dan Kelurahan. Adapun program PKK yang harus diperhatikan yaitu:

1) Penghayatan dan Pengamalan Pancasila

Dalam pelaksaan menumbuhkan kesadaran berkeluarga dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara perlu memahami hak dan kewajibannya sebagai warga Negara dengan sosialisasi melalui penyuluhan, pelatihan dan simulasi terpadu.

2) Gotong Royong

Dalam pelaksanaan gotong royong perlu membangun kerja sama yang baik antarsesama keluarga, warga dan kelompok dalam rangka mewujudkan semangat persatuan dan kesatuan.

3) Pangan

Mempelajari cara pengolahan akan kebutuhan makanan keluarga sebagai faktor penting untuk pertumbuhan dan kesehatan individu di dalam kesejahteraan keluarga. Makanan keluarga harus cukup seimbang,

mengandung kalori yang sesuai dengan keperluan setiap individu sehingga cukup protein, vitamin dan mineral, menarik dan sedap sesuai selera dan keuangan keluarga.

4) Sandang

Cara pengelolaan kebutuhan keluarga sebagai kebutuhan hidup yang mempunyai pengaruh terhadap individu baik jasmani, rohani dan sosial. Dan membudayakan perilaku berbusana sesuai dengan moral budaya Indonesia dan meningkatkan kesadaran masyarakat mencintai produksi dalam negeri.

5) Perumahan dan Tata Laksana Rumah Tangga

Perumahan sebagai kebutuhan hidup yang pokok disamping sandang dan pangan. Perumahan mempunyai pengaruh yang besar terhadap kesejahteraan keluarga, sehingga perlu diusahakan agar fungsi rumah sebagai tempat tinggal menjadi nyaman dan layak untuk ditinggali. Meningkatkan permasyarakatan tentang perumahan sehat dan layak huni serta menumbuhkembangkan kesadaran akan bahaya bertempat tinggal di daerah perbukitan dan menumbuhkan kesadaran hukum tentang kepemilikan rumah dan tanah.

6) Pendidikan dan Keterampilan

Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran keluarga mengenai tumbuh kembang anak balita secara optimal dan pentingnya PAUD melalui pelatihan BKB atau Bina Keluarga Balita dan penyuluhan orientasi PAUD. Melakukan penyuluhan dan menggerakkan keluarga tentang wajib belajar pendidikan dasar 12 tahun (Wajib Dikdas 12 tahun).

7) Kesehatan

Memeliharan kesehatan individu maupun keluarga dan lingkungannya, baik jasmani, rohani dan sosial mencakup pendidikan kesehatan pribadi dan keluarganya, kebersihan lingkungan, sumber air minum yang sehat, pembuangan limbah dan pelestarian lingkungan hidup. Dan upaya perbaikan gizi keluarga, kepedulian keluarga terhadap perilaku hidup bersih dan sehat serta pola makan sehat dan bergizi seimbang.

8) Pengembangan Kehidupan Berkoperasi

Memotivasi keluarga agar mau menjadi anggota koperasi untuk meningkatkan penghasilan keluarga. Keuangan keluarga secara rasional, efektif dan efisien berdasarkan penghasilan keluarga yang dihubungkan dengan pendapatan dan pengeluaran dengan melaksanakan cara hidup sederhana dan sehat.

9) Kelestarian Lingkungan Hidup

Kebiasaan membuang sampah di tempat yang benar, cuci tangan dengan sabun setelah buang air kecil/besar dan sebelum makan, minum serta dalam mengolah makanan. Pengelolaan sampah rumah tangga dan kebersihan perorangan dan melakukan program sejuta pohon sebagai paru-paru lingkungan perumahan.

10) Perencanaan Sehat

Pentingnya suatu perencanaan untuk masa depan kehidupan dan penghidupan keluarga dengan mempertimbangkan bakat, kondisi dan kesanggupan dari masing-masing keluarga sehingga dapat mencapai keluarga sejahtera dan kesejahteraan masyarakat. Meningkatkan

penyuluhan tentang pentingnya pemahaman dan kesertaan dalam program keluarga berencana menuju keluarga berkualitas.

Kesepuluh pokok program PKK ini saling berhubungan, saling mempengaruhi dan tidak dapat dipisahkan, sehingga menjadi satu kesatuan ilmu pengetahuan dan ketrampilan yang mendasarkan pada kesejahteraan keluarga, meliputi sandang, pangan, perumahan, keuangan/berkoperasi, kesehatan dan keamanan. Untuk itu segala sumber yang ada dalam keluarga harus ditatalaksanakan yang berarti segala aktivitas keluarga direncanakan terlebih dahulu. Pelaksanaan tatalaksana untuk mencapai tujuan yang diinginkan harus bekerja sama antar anggota keluarga dan dalam kehidupan bermasyarakat. Sehingga perlu adanya penghayatan dan pengamalan Pancasila serta gotong royong dengan cara memberikan pendidikan dan ketrampilan bagi keluarga.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa PKK merupakan organisasi yang menjadi wadah dalam membina keluarga bermasyarakat baik di perkotaan maupun di pedesaan yang dapat menghasilkan sinergi untuk keluarga sejahtera pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah, yang pengelolaannya dari, oleh dan untuk masyarakat.

3. Peranan PKK

Peranan PKK merupakan segala macam tindakan yang dilakukan melalui berbagai macam kegiatan ketrampilan yang banyak dilakukan mulai dari hidup sehat, pendidikan keluarga yang dimulai dari lingkungan terbawah

Rumah Tangga (RT) hingga Desa dan kelurahan. Peran PKK sangat penting bagi pemerintah karena merupakan penengak utama antara negara dan wanita desa. PKK bahkan bertugas untuk mensukseskan program P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila) pemerintah secara tegas menyebutkan bahwa PKK berperan dan bertujuan sebagai pembantu pemerintah dalam usaha pembangunan. Bahkan dalam struktur organisasi berada di bawah naungan departemen dalam negeri, dan ketuanya di tingkat desa adalah istri kepala desa.

Peranan PKK tersebut sejalan dengan visi dan misi PKK, dan didukung dengan sepuluh program pokok yang dimiliki PKK, kemudian lebih dikenal sebagai "Sepuluh Program Pokok PKK". Kesepuluh program pokok tersebut adalah: (1) Penghayatan dan pengamalan Pancasila; (2) Gotong royong; (3) Pangan; (4) Sandang; (5) Perumahan dan tata laksana rumah tangga; (6) Pendidikan dan ketrampilan; (7) Kesehatan; (8) Pengembangan kehidupan koperasi; (9) Kelestarian lingkungan hidup; (10) Perencanaan sehat.

Dengan sepuluh program pokok PKK tersebut dapat diketahui secara jelas bahwa PKK memiliki agenda dan tujuan yang sangat mulia, yaitu ingin mencapai kemajuan dan kesejahteraan keluarga yang menjadi dambaan setiap keluarga. Supaya dalam pelaksanaannya dapat berdaya guna dan berhasil guna, maka PKK membentuk Kelompok Kerja (Pokja) dengan spesifikasi penanganan yang khusus. Pokja-pokja tersebut (sekarang ada empat pokja) berjalan seiring dan saling melengkapi sehingga koordinasi

di antara keempat pokja tersebut sangat diperlukan untuk mencapai hasil yang optimal.

4. Tinjauan Tentang Pemberdayaan Wanita

a. Pengertian Pemberdayaan

Dalam kaitan dengan pemberdayaan masyarakat, menurut Payne dalam Isbandi Rukminto Ali (2008: 77) bahwa:

> Pemberdayaan pada intinya ditujukan guna membantu klien memperoleh daya untuk mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan ia lakukan yang terkait dengan diri mereka, termasuk mengurangi efek hambatan pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan. Hal ini dilakukan melalui peningkatan kemampuan dan rasa percaya diri untuk menggunakan daya yang ia miliki, antara lain melui transfer daya dari lingkungannya.

Menurut Shardlow dalam Isbandi Rukminto Ali (2008: 78) bahwa "pemberdayaan pada intinya membahas bagaimana individu, kelompok, ataupun komunitas berusaha mengontrol kehidupan mereka sendiri dan mengusahakan untuk membentuk masa depan sesuai dengan keinginan mereka".

Dalam konteks pemberdayaan bagi perempuan, menurut Nursahbani Katjasungkana dalam Riant Nugroho (2008: 164) mengemukakan, ada empat indikator pemberdayaan.

1) Akses, dalam arti kesamaan hak dalam mengakses sumber daya-sumber daya produktif di dalam lingkungan

2) Partisipasi, yaitu keikutsertaan dalam mendayagunakan asset atau sumber daya yang terbatas tersebut.

3) Kontrol, yaitu bahwa lelaki dan perempuan mempunyai kesempatan yang sama untuk melakukan kontrol atas pemanfaatan sumber daya-sumber daya tersebut.

4) Manfaat, yaitu bahwa lelaki dan perempuan harus sama-sama menikmati hasil-hasil pemanfaatan sumber daya atau pembangunan secara bersama dan setara.

Menurut Gunawan Sumodiningrat dalam Riant Nugroho (2008: 164) menjelaskan untuk melakukan pemberdayaan perlu tiga langkah yang berkesinambungan, yaitu:

1) Pemihakan, artinya perempuan sebagai pihak yang diberdayakan harus dipihaki daripada laki-laki.

2) Penyiapan, artinya pemberdayaan menuntut kemampuan perempuan untuk bisa ikut mengakses, berpartisipasi, mengontrol, dan mengambil manfaat.

3) Perlindungan, artinya memberikan proteksi sampai dapat dilepas.

Menurut Musawa dalam Onny S. Prijono (2010: 79) bahwa:

> Pemberdayaan adalah suatu upaya untuk membangun eksistensi pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa, pemerintahan, negara, dan tata dunia dalam kerangka proses aktualisasi kemanusiaan yang adil dan beradab, yang terwujud di berbagai kehidupan: politik, hukum, pendidikan dan lain sebagainya. Pemberdayaan itu sendiri mengandung tiga kekuatan (*power*) di dalam dirinya, yakni *power to*, yaitu kekuatan untuk berbuat; *power with*, yaitu kekuatan untuk membangun kerjasama; dan *power-within*, yaitu kekuatan dalam diri pribadi manusia.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan adalah segala upaya yang dilakukan untuk membangun

individu ataupun kelompok berusaha untuk mengusahakan kehidupan sesuai dengan keinginannya.

b. Tinjauan Tentang Wanita

Di Indonesia, Wanita merupakan sumber daya manusia. Wanita memiliki peranan dalam pembangunan bangsa. Menurut Sri Rejeki dalam Remiswal (2013: 34), Menteri Pemberdayaan Wanita bahwa Wanita masih sukar mengaktualisasikan dirinya ke masyarakat, berbangsa, bernegara, karena disebabkan oleh lima faktor, yaitu: (1) system tata nilai budaya yang masih menggunakan pola patriarkhi; (2) masih banyak peraturan perundang-undangan yang bias gender sehingga wanita kurang mendapat perlindungan yang setara dengan pria; (3) adanya kebijakan dan program pembangunan yang dikembangkan secara bias gender, sehingga wanita kurang mendapat kesempatan untuk mengakses, mengontrol, berpartipasi, dan menikmati hasil pembangunan; (4) adanya pemahaman dan penafsiran ajaran agama yang kurang teapat sebagai akibat dari banyak pemuka agama yang menggunakan pendekatan tekstual disbanding kontekstual; dan (5) dampak dari semua itu, persaingan diantara wanita akan membawa kerugian pada diri perempuan sendiri.

Perempuan juga dihadapkan pada keterbatasan akses dalam kepemilikan. Indikasi ke arah tersebut menurut Irianto dalam Remiswal (2013: 34) dapat dilihat pada hokum adat pada setiap etnis yang berpotensi bagi diskriminasi gender. Pendapat lain yang dikemukakan oleh Sumaatmadja dalam Remiswal (2013: 34) bahwa pada masyarakat dengan system

kekerabatan patrilinial, wanita bukan ahli waris ayah atau suaminya, dan perempuan menjadi tanggungan anak laki-laki tertuanya, bila mereka sudah tua.

Dalam menempuh jenjang karir, wanita juga dibenturkan dengan isu beban ganda. Beban ganda yang dimaksud terkait dengan perannya sebagai istri atau ibu rumah tangga. Pekerjaan sebagai ibu rumah tangga tidak pernah dinilai ataupun dihargai sama dengan pekerjaan maskulin. Sehingga perempuan tetap perempuan dengan peran domestiknya. Tetapi perempuan juga menunjukkan kualifikasinya, tanpa harus meninggalkan beban pokoknya. Robbins dalam Remiswal (2013: 35) mengemukakan dua kesimpulan tentang hubungan jenis kelamin dan kepemimpinan. Pertama, kemiripan antara pria dan wanita cenderung labih daripada perbedaan. Kedua, perbedaan hanya terletak pada wanita mengandalkan gaya kepemimpinan yang labih demokratis, sedangkan pria merasa lebih nyaman dengan gaya direktif.

Secara umum partisipasi wanita tidak bias dipisahkan dari tujuan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, karena wanita bagian dari masyarakat. Partisipasi wanita dalam pembangunan dapat dilakukan dengan cara (1) adanya kontak dengan pihak lain dan merupakan titik awal perubahan sosial, (2) menyerap atau memberikan tanggapan terhadap informasi, baik dalam arti menerima, menerima dengan syarat atau menolaknya, (3) turut dalam perencanaan pembangunan serta pengambilan keputusan, (4) terlibat dalam operasional pembangunan, (5) turut

menerima, memelihara, dan mengembangkan pembangunan, dan (6) menilai pelaksanaan pembangunan sesuai dengan rencana dan hasilnya memenuhi kebutuhan masyarakat.

Partisipasi wanita dalam pembangunan dapat dilihat dari tiga pendekatan. Pertama Pendekatan *Woman In Development* (WID) merupakan proses pengintegrasian wanita dalam program pembangunan. Menurut Buhanuddin dan Faturrahman dalam Remiswal (2013: 36) pendekatan ini berangkat dari *ideology developmentalism.* Dimana pembangunan merupakan wujud pemikiran modern atau terjadinya modernisasi pemikiran tentang pembangunan di Negara-negara dunia. Sehingga pembangunan merupakan proses kemajuan yang bergerak secara linier dan pasti. Hanya saja, perempuan tetap masih berada dalam posisi terbelakang, baik sebagai pelaku, objek, maupun pemanfaat pembangunan. Penyebabnya adalah wanita tidak dilibatkan dalam kegiatan pembangunan, baik karena alasan klasik seperti peran subordinat wanita maupun alasan-alasan yang berkaitan dengan sosial budaya.

Menurut Dharma dalam Remiswal (2013: 36) pendekatan WID berpijak dari dua sasaran, yaitu (1) prinsip egalitarian, kepercayaan bahwa semua orang sederajat. (2) menitikberatkan pada pengadaan program yang dapat mengurangi diskriminasi yang dialami oleh perempuan pada sector produksi. Menurut Buhanuddin dan Faturrahman dalam Remiswal (2013: 36)merumuskan sebagai prinsip dasar yang perlu diupayakan dalam proses pembangunan, yaitu (1) kesetaraan hak antara wanita dan pria harus

diabadikan sebagai prinsip fundamental, (2) perempuan harus diakui sebagai agen dan pewaris perubahan, (3) model pembangunan baru yang berperspektif gender, yang bertujuan untuk memperluas pilihan-pilihan bagi wanita dan pria, namun perbedaan budaya dan masyarakat tidak boleh dianggap sebagai sesuatu yang bersifat kodrati.

Kedua, Pendekatan *Women In Development* (WAD) merupakan tindak lanjut dari pendekatan terdahulu. Dalam WID antara wanita dan pria memiliki kedudukan, kesempatan, dan peran yang sejajar. Sedangkan menurut Dharma Menurut Buhanuddin dan Faturrahman dalam Remiswal (2013: 37) pendekatan WAD adalah menekankan pada hubungan antara wanitadan proses pembangunan. Terkait dengan posisi pria dan wanita dalam pembangunan. Pendekatan WAD dianggap lebih kritis, namun terbentur pada hubungan patriarkhi yang terjadi dalam corak produksi masyarakat. Untuk itu pendekatan WAD harus ditunjang oleh struktur politik yang lebih stabil dan merata pada skala nasional dan internasional. Sehingga dalam implementsianya WAD menitikberatkan pada pengembangan kegiatan peningkatan pendapatan tanpa memperhatikan unsur waktu yang digunakan oleh perempuan.

Ketiga, Pendekatan *Gender In Development* (GAD) lebih menekankan pada orientasi hubungan sosial dalam pembangunan. GAD memfokuskan gerakannya pada hubungan gender dalam kehidupan sosial. GAD berasumsi bahwa persoalan mendasar dalam pembangunan adalah adanya hubungan gender yang tidak adil. Menurut Darwin Menurut Buhanuddin

dan Faturrahman dalam Remiswal (2013: 37) situasi inilah yang menghalangi pemerataan pembangunan dan partisipasi penuh wanita. Menurut GAD bahwa kesetaraan gender harus diupayakan pada aspek substansional berikut: (1) pemberian akses yang sama dalam pendidikan sebagai upaya mendasar terjadinya perubahan sosial dan transfer ilmu pengetahuan dan keterampilan, (2) pengakuan terhadap hak-hak perempuan sebagai bagian integral dari hak-hak asasi manusia, (3) memberikan kemandirian ekonomi yang sama, termasuk akses terhadap dunia kerja, gaji yang sama, serta pendidtribusian asset yang sama, dan (4) pemberian akses yang sama pula dibidang politik dan posisi-posisi strategis dalam pengambilan keputusan.

B. Kerangka Pikir

Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) merupakan organisasi masyarakat yang menjadi merupakan wadah dalam membina keluarga bermasyarakat baik di perkotaan maupun di pedesaan yang dapat menghasilkan sinergi untuk keluarga sejahtera pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah, yang pengelolaannya dari, oleh dan untuk masyarakat.

Program kerja PKK berorientaasi pada praksis, artinya PKK bergerak pada aksi-aksi nyata memberdayakan dan memihak kaum wanita. Dan lebih dari itu, PKK mempunyai andil besar dalam mensukseskan lomba desa. Terkait dengan hal tersebut, dalam upaya mempercepat terwujudnya tujuan pembangunan yang *pro poor, pro gender, dan pro job*, maka

pemberdayaan PKK perlu terus ditingkatkan. Pemberdayaan PKK dalam keluarga meliputi segala upaya Bimbingan, Pembinaan dan Pemberdayaan agar keluarga dapat hidup sejahtera, maju dan mandiri.

Peranan PKK merupakan segala tindakan yang dilakukan melalui organisasi PKK yang menjadi merupakan wadah dalam membina keluarga bermasyarakat baik di perkotaan maupun di pedesaan yang dapat menghasilkan sinergi untuk keluarga sejahtera pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah, yang pengelolaannya dari, oleh dan untuk masyarakat.

Pemberdayaan wanita merupakan usaha untuk meningkatkan atau mendorong kaum wanita agar mampu meningkatkan kemampuannya. Pemberdayaan ini sangat diperlukan karena dalam kehidupan sehari-hari perempuan sering mengalami keterbatasan dalam mengaktualisasikan dirinya.

Peranan PKK dalam meningkatkan pemberdayaan wanita merupakan segala tindakan yang dilakukan oleh PKK dengan tujuan meningkatkan kemampuan yang dimiliki oleh perempuan menuju kehidupan keluarga yang sejahtera dan mandiri. Melalui PKK yang berperan sebagai wadah dalam pembangunan masyarakat, memberdayakan keluarga, dan melaksanakan program pokok wanita dapat berperan aktif dalam meningkatkan peranannya, diharapkan harkat dan martabat wanita sebagai bagian dari keluarga dapat ditingkatkan.terdapat empat indikator dalam pemberdayaan wanita, yaitu akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat.

Dengan demikian, untuk lebih jelasnya kerangka pikir dalam penelitian ini dapat dilihat dari bagan berikut ini:

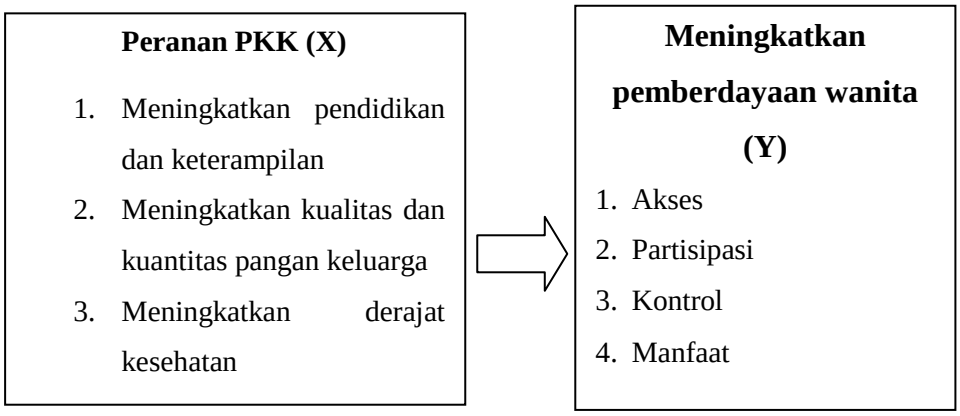

Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir